

ABSTRAK
REKONSTRUKSI HUKUM PERAN NEGARA KESEJAHTERAAN
(WELFARE STATE) DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI SOSIAL
BPJS KESEHATAN BERBASIS NILAI KEADILAN

Tidak hadirnya Negara dalam konteks permasalahan masyarakat, tentunya menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah negara memiliki kewajiban dalam memberikan asuransi sosial kesehatan kepada warga negaranya. Selain itu dengan azas portabilitas dan kepersertaan, maka konsep keadilan tidak tercermin dalam konsep asuransi sosial di Indonesia. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisa penyebab hukum peran negara kesejahteraan dalam asuransi sosial BPJS Kesehatan saat ini belum berbasis nilai keadilan. Penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisa kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan asuransi sosial BPJS Kesehatan saat ini. Selain itu penelitian ini ditujukan pula untuk rekonstruksi hukum peran negara dalam penyelenggaraan Asuransi Sosial BPJS Kesehatan berbasis nilai keadilan.

Penelitian mengenai Rekonstruksi konsep Asuransi Sosial Kesehatan Berbasis nilai keadilan menggunakan paradigma Positivisme dan merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan empiris. Hasil kajian memperlihatkan bahwa, negara memiliki kewajiban dalam memberikan asuransi sosial kesehatan kepada warga negaranya berdasarkan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai sumber dari sumber hukum di Indonesia. Asuransi sosial kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara Indonesia dilaksanakan tidak berbasis pada nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu diperlukan konsep asuransi sosial berbasis nilai-nilai keadilan yang ideal di Indonesia.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, Peran negara kesejahteraan dalam asuransi sosial BPJS Kesehatan saat ini ialah membangun Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pemerintah saat ini hanya memberlakukan pertanggung jawaban sisa dengan menggunakan asuransi sosial dalam menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menegaskan ketentuan pelaksanaan jaminan sosial yang mewajibkan kepada pesertanya membayar iuran jika sakit adalah bukti negara menegasikan kewajibannya (*state obligation*) untuk menjamin hak asasi warga negaranya, hal ini telah melanggar hak konstitusional masyarakat atas jaminan kepastian kewajiban pemeliharaan negara kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945.

Kata Kunci: Peran Negara, Suransi Sosial, dan Negara Kesejahteraan.

ABSTRACT
**RECONSTRUCTION OF THE ROLE OF WELFARE STATE IN THE
IMPLEMENTATION OF JUSTICE-BASED BPJS HEALTH SOCIAL
INSURANCE**

The absence of the State in the context of community problems, of course raises the question, namely whether the state has an obligation to provide social health insurance to its citizens. Apart from that, with the principles of portability and participation, the concept of justice is not reflected in the concept of social insurance in Indonesia. This study is aimed at analyzing the legal causes of the role of the welfare state in BPJS Health social insurance which are not currently based on the value of justice. This study is also aimed at analyzing the weaknesses that arise in the current implementation of BPJS Health social insurance. In addition, this research is also aimed at the legal reconstruction concept of the role of the state in the implementation of the Social Insurance for BPJS Kesehatan based on the value of justice.

Research on the Reconstruction of the Social Health Insurance concept based on the value of justice uses the positivism paradigm and is a doctrinal law research with an empirical approach. The results of the study show that the state has an obligation to provide health social insurance to its citizens based on Pancasila and the opening of the 1945 Constitution as a source of law in Indonesia. Social health insurance which is organized by the State of Indonesia is implemented not based on the values of justice. Therefore we need a social insurance concept based on the values of ideal justice in Indonesia.

The results show that the role of the welfare state in BPJS Kesehatan social insurance at this time is to build a National Social Security System. The government currently only imposes residual coverage using social insurance in providing health social security. The provisions of Article 17 paragraph (1) of Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System which confirms the provisions for the implementation of social security which obliges participants to pay contributions if they are sick is proof of the state negating its obligations (state obligation) to guarantee the human rights of its citizens. This violates the constitutional rights of the people to guarantee the certainty of state maintenance obligations to the poor and neglected children as regulated in Article 34 paragraph (1) of the 1945 Constitution.

Keywords: The Role of the State, Social Insurance and the Welfare State.